

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan ketahanan pangan Desa Gununglurah mulai bertransformasi dari pola bantuan dan infrastruktur menjadi usaha produktif berbasis Bumdes. Bawa pemerintah desa memberikan kewenangan kepada Bumdes dalam melaksanakan program ketahanan pangan dengan mengalokasikan dana sebesar 20% dari dana desa sebagai modal usaha. Terdapat dua program dalam bidang pertanian dan peternakan terbagi menjadi tiga unit usaha bebek petelur, unit usaha penggemukan sapi pedaging, dan petanian unit usaha tanaman padi. Adapun program yang sudah berjalan adalah program peternakan pada unit usaha bebek petelur dan unit usaha penggemukan sapi. Sedangkan program yang belum dapat berjalan di tahun ini pada bidang pertanian unit usaha tanaman padi dengan target yang akan dilaksanakan di bulan Januari tahun 2026. Penggunaan teori jaringan aktor dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya kolaborasi antaraktor untuk keberlangsungan program dan meningkatkan suatu jaringan sehingga membentuk struktur kebijakan yang mendukung upaya swasembada pangan di tingkat lokal.

Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan penguatan kapasitas BUMDes dalam pengelolaan usaha, peningkatan keterlibatan masyarakat pada setiap program, serta pengembangan kegiatan pangan yang beragam, tidak menitikberatkan pada penyediaan bibit atau infrastruktur, melainkan juga memperhatikan proses pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil pertanian. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi hal yang penting guna menjamin transparansi penggunaan dana desa sekaligus menjaga keberlanjutan program. Penelitian ini memperkuat penggunaan *Actor-Network Theory* (ANT) dalam memahami dinamika kebijakan di desa, khususnya bagaimana aktor manusia dan non-manusia saling terkait dalam membangun jaringan kebijakan. Selain itu, sebagai perbandingan dan pertimbangan bagi desa lain dan pemerintah daerah maupun pusat dalam menjalankan kebijakan berupa alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan melalui BUMDes.